



BULETTIN | TW II 2021

LONG FORM AUDIT REPORT

PENILAIAN ATAS PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (LKPD TA) 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di aula serba guna kantor sementara DPRD Sulbar jl. Abd. Malik Pattana Endeng mamuju-Sulawesi Barat.

Penyerahan LHP dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, **Dori Santosa** melalui Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, **Hery Ridwan** yang diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, **Siti Suraidah Suhardi** dan Gubernur Sulawesi Barat, **Ali Baal Masdar**.

Selain menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020, BPK juga meyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (Lanjut ke halaman selanjutnya)

OTHER NEWS

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 kepada Pemkab

Sinergi BPK dan Media (Media Workshop 2021)

BPK Sulbar Berbagi

Vaksinasi Pegawai BPK Sulbar

Gowes BPK Sulbar ft Balai Diklat Gowa



(Lanjutan...) Dalam sambutannya, Dori Santosa menyampaikan bahwa International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) telah menetapkan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) Nomor 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens. ISSAI Nomor 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik.

Dengan demikian, selain memberikan opini mulai saat ini LHP atas laporan keuangan juga menyampaikan penilaian atas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kinerja pemerintah dan dikenal sebagai Long Form Audit Report (LFAR).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan SAP berbasis Akrual, telah diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material sehingga BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

MESKIPUN MEMPEROLEH OPINI WTP, NAMUN BPK MASIH MENEMUKAN BEBERAPA PERMASALAHAN

Meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian efektivitas program dan hendaknya menjadi perhatian Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat seperti :

- Pengelolaan kas pada sekolah negeri (SMAN dan SMKN) tidak memadai;
- 2.Kekurangan Volume Pelaksanaan Kegiatan Try Out Masuk Perguruan Tinggi Pembinaan Siswa Berprestasi Akademik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai 211 juta rupiah;
- 3. Penatausahaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan sehingga berisiko peyalahgunaan atas kas yang masih disimpan oleh Bendahara BOS yang tidak dilaporkan; dan
- 4. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai. Terdapat aset yang berasal dari hibah Kementerian Pendidikan senilai 3,94 miliar rupiah yang belum tercatat dalam KIB dan Peralatan dan Mesin senilai 8,89 miliar rupiah yang masih dicatat secara gabungan.









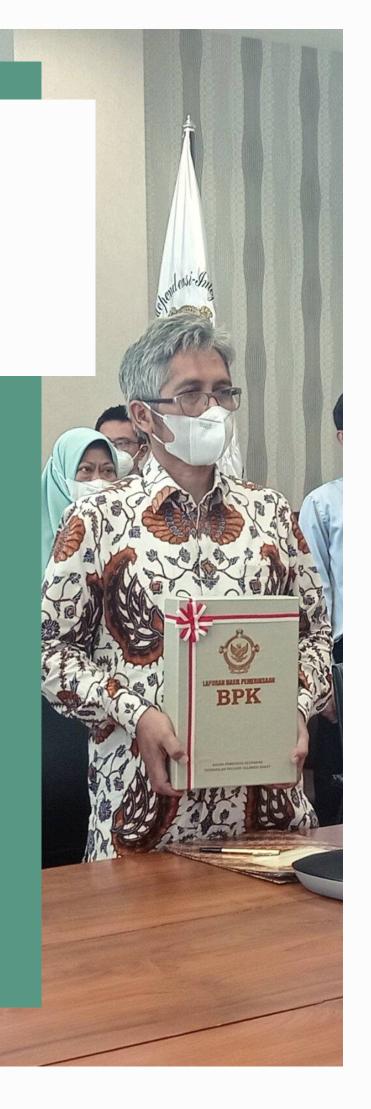
Sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berharap untuk segera di tindak lanjuti hasil
temuan tersebut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK MENYERAHKAN LHP ATAS LKPD TA 2020

PADA PEMERINTAH KABUPATEN SE-PROVINSI SULAWESI BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Perwakilan, Hery Ridwan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (LKPD TA) 2020 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Madar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah pada Selasa (25/05) serta Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene,dan Mamasa pada kamis (03/06) secara daring dari Kantor Badan Diklat PKN Gowa BPK RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masingmasing kepada Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Atas capaian tersebut, BPK meyampaikan selamat dan berharap agar menjadi momentum untuk tetap menjaga komitmen dan lebih mendorong terciptanya Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. BPK mengingatkan kepada seluruh bupati beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.





Penyerahan LHP mateng







Penyerahan LHP Mamasa

Penyerahan LHP Majene







Penyerahan LHP Mamuju

Penyerahan LHP pasangkayu





PENYERAHAN LHP LKPD







Penyerahan LHP Polewali Mandar



Foto Bersama Pasca Penyerahan LHP



Suasana Zoom Meeting Penyeragah LHP

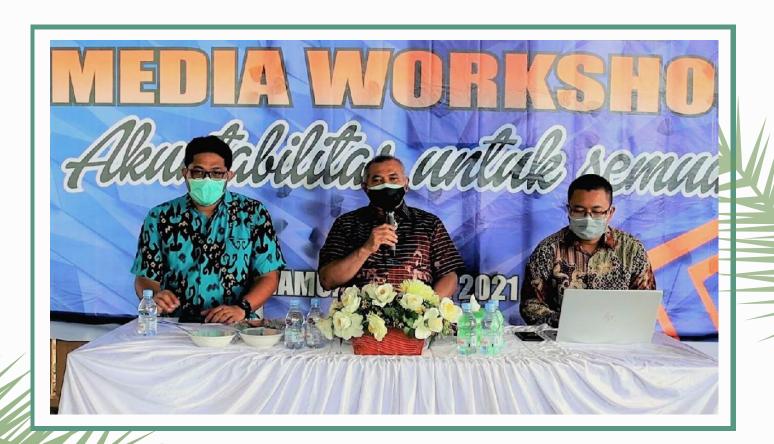


Suasara Zoom Meeting Penyeragab LHP

Sinergi BPK dan Media, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik

Sejalan dengan visi Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
yakni untuk menjadi lembaga pemeriksa
terpercaya yang berperan aktif dalam
mewujudkan tata kelola keuangan negara
yang berkualitas dan bermanfaat untuk
mencapai tujuan negara, BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan
kegiatan Media Workshop Tahun 2021
dengan tema "Akuntabilitas Untuk Semua"
pada Kamis, 1 Juli 2021 di Rangas Beach,
Kabupaten Mamuju.

Dalam Pelaksanaannya, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengahdirkan Kepala Subauditorat, Ali Wardahana dan Pejabat Fungsional Pemeriksa, Aditya Rifa Kartika selaku narasumber yang menyampaikan informasi terkait kedudukan BPK, kode etik BPK, peran BPK dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Hasil Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Semester II Tahun 2020 dan Hasil-Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 se-Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Insan Media di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat dan perwakilan Humas Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Barat tersebut berlangsung lancar, tertib, dan mendapat antusias yang baik dari para peserta walau dilaksanakan dalam masa pandemi dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.





Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Hery Ridwan didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan Aminullah saat penyerahan paket sembako dan uang tunai pada kegiatan "Ramadhan Berbagi"



BPK SULBAR BAGIKAN PAKET SEMBAKO KEPADA PARA PEGAWAI TIDAK TETAP

Memanfaatkan momentum Bulan Suci Ramadhan untuk menjalin silaturahmi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Ramadhan Berbagi dengan memberikan paket sembako berupa beras, minyak, gula pasir, sirup, teh, dan uang tunai di pelataran Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 27 April 2021. Paket tersebut diserahkan kepada para Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti tenaga administrasi, security, tenaga medis, dan cleaning service di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan bantuan yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI Hery Ridwan didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan Aminullah beserta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.



TAHUKAH KAMU?



70% Penduduk harus divaksin untuk menciptakan suatu *Herd Immunity* (Kekebalan Kelompok)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya mengurangi laju penyebaran Covid-19 di Lapangan Tenis Indoor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa. 20 April 2021. Vaksinasi kali ini merupakan vaksinasi Covid-19 tahap 2 BPK Sulbar dimana sebelumnya pegawai di Lingkup BPK Sulbar menerima vaksin tahap pertamanya pada 24 Maret 2021 ditempat yang sama. Kegiatan vaksinasi Covid-19 ini merupakan bentuk kerja sama antara BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK Sulsel). BPK Sulbar, Balai Diklat PKN Gowa, dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang mengusung tema "Vaksin Aman, Halal & Berkualitas" ini merupakan upaya yang dilakukan BPK Sulbar dalam rangka mengurangi laju penyebaran Covid-19.



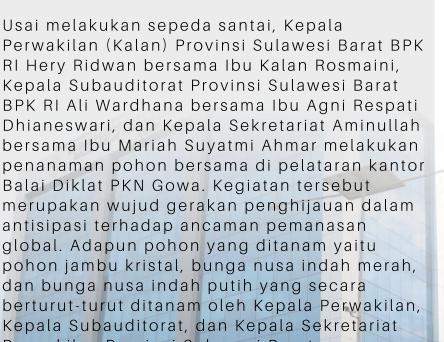






BPK Sulbar Berkolaborasi dengan Balai Diklat PKN Gowa ajak Galakkan Penghijauan Alam

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Balai Diklat PKN Gowa mengadakan kegiatan sepeda santai sambut Ramadhan dan penanaman pohon di pelataran Kantor Balai Diklat PKN Gowa pada Sabtu, 10 April 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan serta ajang silaturahmi antar pegawai BPK Sulbar dengan pegawai Balai Diklat PKN Gowa. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan staf Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat serta Badan Diklat PKN Gowa ini dimulai dari halaman Balai Diklat PKN Gowa dan finish di tempat semula dengan menyusuri jalan protokol yang jaraknya ± 25 km.











GALERI KEGIATAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT





Penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan



Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkup BPK Sulbar





Rapat Internal Pejabat Struktural



Perayaan Hari Raya Idul Fitri di Balai Diklat Gowa BPK RI





Health Education oleh DWP BPK Sulbar

Kami Segenap Tim Publiakasi Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA







CARA PENGGUNAAN MASKER DOBEL YANG BENAR

Penyebaran varian baru virus corona menuntut kita untuk lebih waspada dan memperketat perlindungan diri saat berada di luar rumah. Salah satu yang dianjurkan adalah menggunakan dua masker atau masker dobel.

Bagaimana penggunaan dua masker yang dianjurkan?



Masker dobel hanya untuk penggunaan kombinasi masker medis dan masker kain.

Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa masker bedah dapat menghalangi partikel udara yang berpotensi menularkan virus Corona sebanyak 84,3 persen. Tetapi, ketika didobel dengan masker kain, perlindungannya bisa meningkat hingga 96,4 persen.













Tindakan penggunaan dua masker sementara ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, karena dapat membuat anak sulit bernapas.



Tim Publikasi

PENGARAH Hery Ridwan

PENANGGUNGJAWAB Aminullah

> KETUA I Made Anom J

WAKIL KETUA Ardiansyah

SEKRETARIS Dedi Setyawan

TIM REDAKSI Hilman Saputera Agung Kriswanto Dicky Febriano Husen Wahyu Adi Yandi Asram